

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perang kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan di bumi Indonesia. Bangsa Indonesia yang memiliki tanah air berkeinginan hidup senantiasa dalam kedamaian dan kesejahteraan. Tidak banyak hal yang menjadi pikiran kecuali mendambakan kemerdekaan yang ditempuh dengan jalan menolak dan menentang penjajahan.

Rentetan peristiwa setelah kemerdekaan memberikan warna tersendiri dalam sejarah panjang Sulawesi Selatan. Setelah kemerdekaan daerah ini tidak pernah luput dari perang karena upaya Belanda yang ingin kembali berkuasa dilawan secara terbuka oleh para pejuang yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Hampir diseluruh daerah terjadi pembentukan organisasi kelaskaran. Para bangsawan dan para pemuda pejuang saling bergandeng tangan menyusun kekuatan untuk membangun perlawanan meski memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang melakukan perlawanan adalah *Onderafdeling* Takalar dengan pusat perjuangan dilakukan di Polongbangkeng.

*Onderafdeling* Takalar ketika itu terdiri atas 8 (delapan) distrik dan 5 (lima) *onderdistrik* yaitu adalah sebagai berikut :

1. Distrik Polongbangkeng.
2. Distrik Laikang.
3. Distrik Sanrobone.
4. Distrik Lengkese.
5. Distrik Topejawa.
6. Distrik Lakatong.
7. Distrik Pappa.
8. Distrik Takalar Gabungan yang terdiri atas 5 (lima) *onderdistrik* yaitu:
  - a. *Onderdistrik* Takalar.
  - b. *Onderdistrik* Tanakeke.

- c. *Onderdistrik* Stangnga.
- d. *Onderdistrik* Bauluwang.
- e. *Onderdistrik* Tompotanah.<sup>1</sup>

Di Polongbangkeng yang merupakan bagian dari *Onderafdeling* Takalar, dibentuk Gerakan Muda Bajeng. Pembentukan gerakan ini dipelopori oleh sejumlah tokoh berpengaruh. Mereka adalah Madinah Daeng Ngitung, Fakhrudin Daeng Romo dan Syamsuddin Daeng Ngerang.<sup>2</sup> Pada tanggal 16 Oktober 1945, wadah Gerakan Muda Bajeng diresmikan berdiri di kota kecil Palleko, Polongbangkeng.<sup>3</sup> H. Padjonga Daeng Ngalle Karaeng Polongbangkeng adalah pemimpin gerakan ini.<sup>4</sup> Gerakan Muda Bajeng pada awal pembentukannya berfungsi sebagai badan kelaskaran dan badan pemerintah darurat revolusioner, pendukung RI.

3

Disebabkan oleh berbagai pertimbangan, wadah perjuangan masyarakat yang mula-mula disebut dengan Gerakan Muda Bajeng kemudian mengalami perubahan menjadi Lipan Bajeng. Pada tanggal 2 April 1946, Gerakan Muda Bajeng digantikan oleh suatu organisasi militer khusus, Lipan Bajeng, yang dikepalai oleh Ranggong Dg Romo.<sup>5</sup>

Ranggong Daeng Romo menganggap Gerakan Muda Bajeng tidak sesuai lagi dengan besarnya ancaman yang dihadapi. Apalagi ketika itu sejumlah tokoh Gerakan Muda Bajeng telah ditawan oleh pihak musuh. Sebagian lainnya malah sudah meninggalkan Polongbangkeng. Bahkan ada diantaranya sudah memihak kepada NICA.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> *Laporan Pengumpulan Data Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Takalar*, (Ujung Pandang: Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan, 1985), Hlm. 6.

<sup>2</sup> Usman Nukman, A. Wanua Tangke. *Ranggong Daeng Romo: Pahlawan Nasional dari Takalar*. (Makassar: Refleksi, 2002). Hlm. 21.

<sup>3</sup> Sarita Pawiloy. *Arus Revolusi di Sulawesi Selatan*. (Ujung Pandang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Propinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 1985-1989, 1987). Hlm. 117.

<sup>4</sup> Ilham Rifai Hasan. *H. Padjonga Daeng Ngalle Karaeng Polongbangkeng, Pahlawan Nasional dari Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan*. (Pallantikang: The Sentinel A Research dan Publication Syndicate, 2011). Hlm. 39.

<sup>5</sup> Suriadi Mappangara, dkk. *Laporan Akhir (Pergolakan di Sulawesi Selatan)*. (Barru: Dinas Kominfo BUDPAR Barru, 2007). Hlm. 27.

<sup>6</sup> Perputakaan Nasional RI: Data Katalog dalam Terbitan (KDT). *Ranggong Daeng Romo Pahlawan Nasional dari Takalar*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2002). Hlm. 56.

Taktik serangan yang sering digunakan untuk melawan Belanda adalah taktik gerilya. Berperang gerilya bukanlah karena kita menganut “ideologi” bergerilya, melainkan karena kita diharuskan, karena telah tidak mampu menyusun kekuatan yang berorganisasi sekadar modern, yang setara. Maka gerilya kita pun baru pada tingkatan melelahkan musuh belum sampai dapat menghancurkannya walaupun bagian demi bagian.<sup>7</sup> Penjajah tidak dapat dikalahkan hanya dengan perjuangan dengan cara bergerilya melainkan dengan kekuatan TNI. Perjuangan Laskar Lipan Bajeng sesungguhnya berlangsung pada 1945-1950.<sup>8</sup>

Atas keinginan wakil-wakil kelaskaran, organisasi kelaskaran yang ada di Makassar dan sekitarnya digabungkan menjadi satu organisasi kelaskaran. Penyatuan dari beberapa kelaskaran ini disebut dengan Laskar Pemberontak Republik Indonesia Sulawesi (LAPRIS). Laskar Pemberontak Republik Indonesia Sulawesi yang dibentuk pada tanggal 17 Juli 1946.<sup>9</sup> Adapun kelaskaran yang tergabung dalam LAPRIS terdapat 19 kelaskaran.

Kelaskaran yang tergabung dalam LAPRIS, sebanyak 19 laskar : Lipan Bajeng, PPNI, Kris Muda, AMRIS, GAPIS, PBAR, LAPTUR A, LAPTUR B, HI, BPRI Pare-Pare, PPI, GPT, BUKA Limbung, KRAP Pallangga, Pemuda Maros, Pemuda Camba, ALRI Makassar, BPI Makassar, dan KPS Makassar<sup>10</sup>

Sebelum penyerahan kedaulatan terjadi, pimpinan Lipan Bajeng dan pasukannya dikepung dan ditawan disebabkan oleh taktik licik Belanda dalam sebuah diplomasi yang beralasan untuk mencari hubungan baik dengan para pimpinan pejuang PKRI di Polongbangkeng. Tajuddin M Kr Lewa dalam bukunya menjelaskan:

Tiga tokoh pejuang yaitu Makkaeng Daeng Manjarungi, Mappa Dg Temba, Muh. Jalal Daeng Leo ditahan terpisah dari pejuang lainnya. Awalnya dimasukkan ke K.L.S kempenen Makassar kemudian dipindahkan ke militer Perpooshuis. Sementara Karaeng

---

<sup>7</sup> A H Nasution. *Pokok-pokok Gerilya (Fundamentals of Guerrilla Warfare): dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan yang akan Datang*. (Yogyakarta: Narasi, 2012). Hlm. 10.

<sup>8</sup> Mustari Bosra. *Perjumpaan Agama dan Nasionalisme dalam Perjuangan Bangsa Indonesia*. (Makassar: Rayhan Intermedia, 2009). Hlm.2.

<sup>9</sup> Suriadi Mappangara, dkk. *Op.Cit*. Hlm.32.

<sup>10</sup> Sarita Pawiloy. *Op.Cit*. Hlm. 126.

Polongbangkeng Padjonga Daeng Ngalle ditahan di penjara Hoqepad, sedang pejuang lainnya sebanyak 200 orang dipenjarakan di rumah tahanan di Layang.<sup>11</sup>

Semua tawanan pejuang termasuk seluruh pimpinan dan anggota pasukan Lipan Bajeng barulah dibebaskan dari semua tuntutan setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Seperti yang telah diuraikan oleh Ginandjar Kartasasmita dkk bahwa:

5

Pada tanggal 23 Desember delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di negeri Belanda, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949.<sup>12</sup>

Bebasnya seluruh tahanan politik diakhir tahun 1949 karena telah diterimanya kemerdekaan dan telah diputuskannya pada Konferensi Meja Bundar (KMB) atas penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Dengan bebasnya seluruh tahanan politik, demi melanjutkan perjuangan, para pejuang di Polongbangkeng bermaksud untuk membentuk Batalyon Lipan Bajeng. Namun, keinginan ini tidak semudah itu dapat terwujud melainkan membutuhkan perjuangan.

Setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat maka terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1950. Terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari peran rakyat yang turut serta dalam membela negara melalui pembentukan kelaskaran diberbagai daerah sebagai wadah perjuangan. Terkait dengan hal tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Perdana Menteri yang berhubungan dengan nasib para pejuang.

...Surat Keputusan Perdana Menteri Moh. Natsir No. 16/PM/1950 yang menetapkan bahwa para pejuang nasional di Sulawesi Selatan diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dalam pelaksanaannya dirancang melalui pembentukan batalyon

---

<sup>11</sup> Tajuddin M Kr Lewa. *Polongbangkeng dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia*. (Jakarta: Yapensi, 2007). Hlm.43-44.

<sup>12</sup> Ginandjar Kartasasmita, dkk. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1955*. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1997). Hlm.287.

latihan. Hal itu berakibat berlarut-larut penyelesaiannya sehingga muncul reaksi dan perlawanan.<sup>13</sup>

Pada periode awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tantangan yang pertama-tama dihadapi adalah usaha regulerisasi keanggotaan Tentara Nasional Indonesia.<sup>6</sup> Persoalan regulerisasi gerilyawan kedalam Tentara Nasional Indonesia juga terjadi di Polongbangkeng.

...Dalam suatu Komperensi di Maros yang diselenggarakan 1950 di bawah pimpinan Saleh Sahban sebagai koodinator Sulawesi dari KGS, batalyon-batalyon gerilya itu setuju untuk bersatu dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Mereka mengusulkan kepada pemerintah agar mereka diberi pengakuan sebagai TNI Divisi Hasanuddin di bawah komando Letnan Kolonel Qahar Muzakkar.<sup>14</sup>

Setelah terbentuknya KGSS, para gerilyawan yang diwakili oleh Qahar Muzakkar mengajukan keinginan mereka ke divisi militer, tetapi keinginan tersebut ditolak karena mereka sebelumnya telah diperintahkan untuk melakukan penyaringan secara perseorangan terhadap gerilyawan yang ingin menjadi tentara.

...bangkitnya BKR-TKR kita dalam tahun 1945 sesudah eksplos proklamasi. Harulah ada perancangan, ketertiban giliran latihan dan lain-lain. Sistem tentara rakyat terlaksana dalam sistem milisi rakyat. Tiap orang berkewajiban membela negara, sebagian kecil diperlukan untuk wajib tentara dan sebagian yang lebih besar untuk wajib sipil. Mereka yang wajib tentara sebagian dipakai untuk wajib tentara dalam arti sebagian masuk susunan-susunan tentara yang tertentu dan sebagian untuk wajib latihan, sebagian wajib tentara luar biasa. Kewajiban itu meliputi umur-umur yang tertentu. dengan demikian dapat diatur angkatan tiap tahun untuk dilatih, karena misalnya mencapai usia 18 tahun, dan dapatlah diatur pembebasan karena misalnya mencapai usia 35 tahun. Maka dapatlah diatur efisiensi pengerahan menurut angkatan-angkatan tahunan.<sup>15</sup>

Apa yang dikemukakan A.H. Nasution di atas merupakan syarat untuk menjadi tentara rakyat. Peraturan-peraturan seperti ini yang menjamin ketertiban dalam tentara regular tidak dapat didekati dalam tentara gerilya. Olehnya, sulit bagi seluruh gerilyawan untuk dapat

---

<sup>13</sup> Edward L. Poelinggoman. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. (Makassar: Balitbangda dengan Masyarakat Sejarawan Sulawesi Selatan, 2005). Hlm. 293.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 309.

<sup>15</sup> A.H. Nasution. *Op. Cit.* Hlm. 146-147

diterima secara keseluruhan ke dalam TNI. Edward L. Poelinggoman dalam bukunya  
7  
menjelaskan secara panjang lebar bahwa:

Komando Teritorial Indonesia Timur (TT-IT) kemudian berubah menjadi TT VII adalah komisi yang dibentuk untuk mengatur keamanan, mengatur pengalihan dari KNIL ke APRIS dan menyeleksi dan melatih para pejuang kemerdekaan/gerilyawan termasuk orang-orang yang telah berjuang bersama-sama TNI di Jawa. Pengendalian kebijaksanaan militer pada waktu itu sepenuhnya ditangan professional Angkatan Darat yang ingin meningkatkan standar militer. Oleh karena itu hampir tidak ada kecenderungan untuk menggabungkan gerilyawan yang kurang terdidik atau satuan-satuan non regular ke dalam APRIS.<sup>16</sup>

Keinginan untuk meregulerisasi para gerilya yang tidak semuda itu dapat terwujud memunculkan keprihatinan akan nasib mereka yang selama ini berjuang, dan merasa kecewa dengan perlakuan yang diterima. Mereka yang selama ini berjuang demi kecintaan terhadap tanah air, rela berkorban jiwa dan raga, namun mereka belum mendapat perlakuan yang sepatasnya mereka terima. Hal inilah yang memicu reaksi hingga memunculkan aksi protes oleh para gerilya. Ditambah, menoleh kebelakang bagaimana pandangan dan sikap hidup mereka yang memiliki rasa solidaritas tinggi hingga menimbulkan rasa tanggung jawab bukan hanya terhadap diri sendiri melainkan juga demi kepentingan bersama.

...Dasar pandangan dan sikap hidup ini biasa dikenal dalam sebutan bahasa Makassar: "*siri' na pace*". Bila diterjemahkan, berarti rasa malu (*siri'*; biasa ditulis: *sirik*); dan (*na*); rasa solidaritas yang bertanggung jawab (*pace*). *Siri'* dapat juga dipandang sebagai harga diri, martabat hidup, atau kehormatan diri. Kesemuanya itu dihubungkan dengan kelompok seseorang.<sup>17</sup>

Bagi orang Makassar sosok manusia utuh ialah mereka yang menjunjung rasa *siri' na pace* dalam kehidupannya. Aksi protes yang dilakukan oleh para gerilya di Polongbangkeng, sedikit banyaknya didorong pula oleh pandangan dan sikap hidup *siri' na pace* .

Berbagai aksi protes berupa kekacauan, perampokan dilakukan sebagai reaksi atas sikap pemerintah, sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib para gerilya khususnya di

---

<sup>16</sup> Edward L. Poelinggoman. *Op. Cit.* Hlm. 309.

<sup>17</sup> Sarita Pawiloy. *Op.Cit.* Hlm. 20

Polongbangkeng yang pernah menjadi pusat laskar perjuangan kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Objek dari tindak kekacauan adalah mereka yang dianggap pernah menjadi penghianat atau yang dianggap pro pada pihak Belanda, bekas mata-mata Belanda yang tinggal di Distrik Polongbangkeng, Distrik Pappa, Distrik Lengcese, Distrik Laikang, dan Distrik Takalar.

Yang sangat merisaukan hati para pejuang khususnya di Sulawesi Selatan terutama disebabkan dihadapan mata para pejuang, orang-orang/oknum yang tadinya merupakan antek-antek penjajahan Belanda (anti Indonesia Merdeka), menduduki hampir sebagian posisi penting pemerintahan dengan sikap congkak yang dimilikinya sejak masa kekuasaan penjajah.<sup>18</sup>

Polongbangkeng yang pernah dikenal masyarakat luas sebagai daerah yang banyak terjadi perampokan. Meskipun sebenarnya perampokan telah ada jauh sebelumnya namun, perampokan besar-besaran yang merupakan suatu gerakan barulah terjadi pada tahun 1950-1952. Kekacauan yang terjadi merupakan aksi protes atas penyelesaian para gerilya kedalam TNI yang berlarut-larut dan Batalyon Lipan Bajeng yang tak kunjung diresmikan.

Pada awal 1952 didapat kata mufakat antara Panglima Teritorium VII Kolonel Gatot Subroto, Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi, dan Lapris yang kemudian membentuk Batalyon infanteri 721. Batalyon itu diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Panglima Teritorium VII Nomor: KPTS/263/VII/1952, tanggal 28 April 1952, bermarkas di Palleko Polongbangkeng, Takalar Komandan pertamanya adalah Kapten Inf. M.Dg.Sibali<sup>19</sup>

Senada dengan penjelasan di atas, Dalam buku Edward L. Poelinggoman juga disebutkan bahwa, "...Lipan Bajeng diresmikan sebagai batalyon TNI tanggal 28 April 1952 di bawah komando Kapten Makkatan Dg Sibali"<sup>20</sup>. Dengan diresmikannya batalyon pertama di Polongbangkeng menjadi pertanda berakhirnya berbagai aksi protes yang dilakukan.

---

<sup>18</sup> Panitia Khusus Penyusun Sej. Perjuangan Kelasykaran Lipan Bajeng. *Sejarah Perjuangan Kelasykaran Lipan Bajeng*. (Polombangkeng: Dewan Harian Angkatan "45" Cabang Kab. DATI II Takalar, 1988)). Hlm.128.

<sup>19</sup> <http://kodam-wirabuana.mil.id/index.php?module=detail&id=26>. Diakses pada tanggal 23/01/2014

<sup>20</sup> Edward L. Poelinggoman. *Op.Cit.* Hlm. 313-314.

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, sebagai alasan penulis memilih judul ini karena bahasan ini cukup menarik dan belum pernah dikaji secara mendalam oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah yang membahas tentang aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng, mulai dari latar belakang, bentuk-bentuk aksi protes yang dilakukan, serta hasil dan dampak aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang pernah dilakukan di Polongbangkeng.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas terkait masalah “Aksi Protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng (1950-1952)” dapat dirinci menjadi tiga subpermasalahan, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng?
2. Bagaimana bentuk aksi protes yang dilakukan oleh Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng?
3. Bagaimana hasil dan dampak aksi protes yang dilakukan oleh Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng?

10

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya Aksi Protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng.



2. Untuk mengetahui bentuk aksi protes yang dilakukan oleh Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng.
3. Untuk mengetahui hasil dan dampak aksi protes yang dilakukan oleh Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan yang berjudul “Aksi Protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng (1950 -1952)” adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peminat sejarah terutama dalam penulisan sejarah lokal yang mengkaji masalah yang relevan.
2. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak tentang aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng.
3. Sebagai tambahan informasi bagi peneliti berikutnya yang meneliti masalah yang sejenis.

#### **E. Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan judul yang diteliti yaitu “Aksi Protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng (1950 -1952)” maka penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secara tematis, pembahasan ini dimulai dari latar belakang aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng, bentuk aksi protes yang dilakukan, serta hasil dan dampak aksi protes tersebut. Secara spasial, pembahasan memfokuskan kajian pada wilayah Polongbangkeng Kabupaten Takalar.

Jika dilihat dari segi temporalnya, batasan temporal dari penelitian ini adalah sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1952. Dimana dalam kurun waktu tahun 1950, munculnya keinginan atau tuntutan dari Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng agar dibentuk

batalyon di Polongbangkeng dan pengangkatan para pejuang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian diakhiri pada tahun 1952 karena pada tahun tersebut keinginan atau pun tuntutan dari Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng telah terpenuhi yaitu dengan diresmikannya Batalyon Infanteri 721 Lipan Bajeng di Polongbangkeng dan diangkatnya para pejuang/gerilyawan menjadi TNI.

## F. Penelitian Sebelumnya

Meskipun sudah ada beberapa karya yang membahas tentang Laskar Lipan Bajeng, akan tetapi penulis belum menemukan tulisan atau karya yang menjelaskan tentang bagaimana aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng. Oleh sebab itu penulis ingin membahas secara khusus bagaimana latar belakang terjadinya aksi protes oleh Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng, bentuk-bentuk 12 dari aksi protes, hingga hasil dan dampak aksi protes yang dilakukan oleh Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng.

Dalam buku H. Tajuddin M Kr Lewa, *Polongbangkeng dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia*. Tajuddin M Kr. Lewa dalam bukunya menjelaskan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengusir kaum penjajah yang dikumandangkan oleh pejuang-pejuang bangsa dari Polongbangkeng Kabupaten Takalar.<sup>21</sup> Dalam buku ini juga terdapat catatan/biografi singkat pejuang Polongbangkeng seperti H. Pajonga Dg Ngalle, Ranggong Dg. Romo, H. Makkaraeng Kr. Manjarungi, dan H. Syamsuddin Dg. Ngerang. Meski demikian, sejarah aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng belum dijelaskan dalam buku ini.

Dalam buku Mustari Bosra, *Laskar Lipan Bajeng: Perjumpaan Agama dan Nasionalisme dalam Perjuangan Bangsa Indonesia*. Dalam buku ini dijelaskan mengenai

---

<sup>21</sup> Tajuddin M Kr Lewa. *Op.Cit.* Hlm. v.

penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga muncul kesadaran nasional dari para pejuang khususnya dari Laskar Lipan Bajeng. Mustari Bosra dalam bukunya juga menjelaskan:

... Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh para mujahid bangsa di Polongbengkeng, Takalar, Sulawesi Selatan. Awalnya mereka mengorganisir diri dalam Gerakan Muda Bajeng dan kemudian dikembangkan menjadi Kelasykaran Lipan Bajeng dan pada akhirnya menjadi pendukung utama Lasykar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS).<sup>22</sup>

Dalam sebuah skripsi oleh Sitti Kursiah (2006) yang berjudul "*Polongbengkeng : Pusat Laskar Pejuang Kemerdekaan Di Sulawesi Selatan (1945-1950)*".<sup>13</sup> Pembahasan skripsi ini terfokus pada Polongbengkeng yang dijadikan pusat perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Sulawesi Selatan, bentuk dan kondisi perjuangan di Polongbengkeng setelah ditetapkan menjadi pusat kelasykaran, serta upaya yang dilakukan di Polongbengkeng dalam membendung pembentukan NIT.<sup>23</sup> Walaupun dalam skripsi ini terfokus pada Polongbengkeng namun belum membahas aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbengkeng.

Meskipun sudah ada beberapa karya yang membahas tentang perjuangan Laskar Lipan Bajeng, akan tetapi penulis belum menemukan tulisan atau karya yang menjelaskan bagaimana aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbengkeng.

## G. Metode Penelitian

Penelitian yang baik ialah penelitian yang dilakukan secara sistematis. Menurut Kuntowijoyo terdapat lima tahapan dalam penelitian sejarah yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi kritik sejarah, interpretasi (analisis dan sintesis), dan penulisan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mustari Bosra. *Op.Cit.* Hlm. vii.

<sup>23</sup> Sitti Kursiah. *Polongbengkeng : Pusat Laskar Pejuang Kemerdekaan Di Sulawesi Selatan (1945-1950)*. Belum diterbitkan. Hlm. vi.

<sup>24</sup> Kutowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 2005), Hlm. 90.

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Takalar khususnya di Polongbangkeng yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Distrik Polongbangkeng.

14

Tajuddin M Kr Lewa menjelaskan 22 distrik bawahan Polongbangkeng yaitu Lassang, Malewang, Moncongkomba, Bontokadatto, Lantang, Pattallassang, Sompu, Bilacaddi, Pasuleang, Salaka, Sabintang, Tamasongo, Sayowang, Anaaung, Sambila, Manuju, Ballo, Malolo, Ko'mara, Ballaborong, Pangkaje'ne, dan Je'nemaeja.<sup>25</sup>

Seiring dengan pembentukan daerah swatantra di Sulawesi Selatan terjadi beberapa perubahan-perubahan, diantaranya perubahan dari kata Afdeling menjadi daerah yang diikuti pula dengan perubahan kata onderafdeling menjadi kewedanan yang terdiri atas beberapa distrik.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah perpaduan antara deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan pengungkapan peristiwa sejarah berdasarkan sumber dan bertumpu pada permasalahan-permasalahan yang dikaji untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menginterpretasikan apa yang melatar belakangi aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng, bentuk-bentuk aksi Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng, serta bagaimana hasil akhir dari aksi protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polongbangkeng selama tahun 1950-1952.

## 3. Heuristik

Tehnik pengumpulan data atau disebut juga dengan istilah heuristik merupakan tahapan awal dalam penelitian sejarah. Tahapan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data atau pun sumber-sumber yang terkait dengan topik yang diteliti. Sumber yang dimaksud dapat berupa sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara atau pun

---

<sup>25</sup> Tajuddin M Kr Lewa. *Op.Cit.* Hlm. 106.

sumber tertulis. Olehnya, untuk tahap heuristik atau pengumpulan sumber dalam penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

15

#### **a. Penelitian Lapangan**

Melalui penelitian yang dilakukan di lapangan diharapkan memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara merupakan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait dengan topik penelitian yang dilakukan. Agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh semaksimal mungkin, maka wawancara dilakukan secara mendalam terhadap para informan yang dianggap mengetahui dan memahami peristiwa tersebut. Seperti halnya wawancara yang dilakukan pada ketua LVRI Kab. Takalar.

#### **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji sumber-sumber berupa buku atau arsip yang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Hasil dari penelitian kepustakaan ini berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, karya hasil penelitian dan yang terutama adalah sumber arsip yang diperoleh di perpustakaan daerah Kabupaten Takalar, perpustakaan wilayah Makassar, Badan Arsip dan Kepustakaan Makassar, dan di beberapa perpustakaan Lembaga Perguruan Tinggi di Makassar, serta di beberapa kantor instansi lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan.

### **4. Kritik Sumber**

Kritik dilakukan dengan menyeleksi dan menguji kebenaran sumber. Pada kegiatan ini dipakai dua macam kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

a. Kritik eksternal.

Kritik eksternal atau kritik luar dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber. Apakah sumber tersebut valid, asli atau tiruan, atau sumber tersebut utuh dalam arti belum berubah. Atau pun kritik yang dilakukan terhadap nara sumber, misalnya apakah nara sumber adalah seorang pelaku atau yang menyaksikan peristiwa tersebut.

b. Kritik internal.

Kritik internal atau kritik dalam dilakukan untuk mengetahui kebenaran isi sumber atau pun informasi yang disampaikan oleh nara sumber yang dapat ditempuh dengan jalan membandingkan dengan sumber lainnya.

Kritik diperlukan untuk memperoleh data yang layak dipercaya. Dalam usaha mencari kebenaran (*truth*), sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil.<sup>26</sup>

## 5. Interpretasi

Interpretasi adalah penguraian analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh melalui tahapan penelitian sebelumnya dan juga merupakan kesimpulan terhadap uraian. Setelah kritik sumber selesai dilakukan, maka diperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang dimaksud berupa fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta yang diperoleh masih berdiri sendiri, maka setiap fakta diberikan penafsiran untuk melihat keterkaitannya antara fakta-fakta tersebut. Dengan demikian fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian memberikan acuan peristiwa yang harmonis dan sistematis.

## 6. Historiografi

---

<sup>26</sup> Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2007). Hlm. 131.

Historiografi merupakan akhir dari seluruh rangkaian proses penulisan sejarah setelah sebelumnya melalui tahap heuristik, kritik dan interpretasi. Tahapan penulisan ini adalah yang terpenting karena penulis mulai mengungkap dan memahami realita sejarah sebagaimana terjadinya suatu peristiwa. Melalui tahap penulisan ini dilakukan rekonstruksi fakta-fakta sejarah yang telah berhasil dikumpulkan dan diseleksi kemudian ditulis dalam bentuk kisah sejarah. Menurut Taufik Abdullah dan Abdurrahman Sorjomihardjo, historiografi merupakan puncak dari segala-galanya dalam metode penelitian sejarah. Sejarawan pada fase ini mencoba menangkap dan memahami *histoire ralite* atau sejarah sebagaimana terjadinya.<sup>27</sup> Fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan dirangkai untuk mengungkap peristiwa sejarah secara kronologis yang pada akhirnya menghasilkan karya penelitian.

---

<sup>27</sup> M. Saleh Madjid dan Abdul Rahman Hamid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Makassar: Rayhan Intermedia. 2008). Hlm. 59.